



KERANGKA ACUAN KERJA

**PAKET
JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
PEKERJAAN MODERNISASI PENGGANTIAN LIFT GEDUNG
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PAKET JASA KONSULTANSI PENGAWASAN

PEKERJAAN MODERNISASI PENGGANTIAN LIFT GEDUNG INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Uraian Pendahuluan

1.	Latar Belakang	<p>a. Kondisi lift gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang rusak tidak berfungsi dengan normal karena kesulitan mendapatkan suku cadang dan usia lift sudah 29 tahun, maka perlu dilakukan modernisasi dengan penggantian agar dapat berfungsi dengan normal, aman dan nyaman;</p> <p>b. APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat Pekerjaan Modernisasi Penggantian Lift Gedung;</p> <p>c. Untuk menindak lanjuti hal tersebut perlu dilakukan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Modernisasi Penggantian Lift Gedung dengan tenaga ahli konsultan pengawas lift.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud kegiatan ini adalah</p> <p>a. Untuk membantu Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan pengawasan pekerjaan modernisasi penggantian lift gedung.</p> <p>b. Petunjuk bagi Konsultan Pengawas yang memuat masukan azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diinterpretasikan dalam pelaksanaan tugas sebagai Konsultan Pengawas sehingga dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.</p> <p>Tujuan kegiatan ini adalah :</p> <p>Agar proses pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat sesuai dengan rencana, waktu dan biaya pelaksanaan serta dapat memenuhi standard teknis yang dipersyaratkan sehingga terwujudnya penggantian lift Gedung sesuai rencana dan dapat berfungsi dengan baik ;</p>
3.	Sasaran	<p>Sasaran kegiatan adalah pelaksanaan pengawasan pekerjaan modernisasi penggantian lift gedung adalah :</p> <p>a. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana gambar, spesifikasi teknis dan biaya serta penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan;</p> <p>b. Tersampainya pemahaman terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa kontruksi;</p> <p>c. Tersedianya laporan pengawasan selama masa pelaksanaan kontruksi.</p>
4.	Lokasi Pekerjaan	<p>Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Alamat : Jl. Pemuda 127 – 133 Semarang</p>
5.	Sumber Pendanaan	<p>a. APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2023 b. Kode RUP 38559994 c. Jumlah anggaran RP.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah)</p>

6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama dan Organisasi: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Inspektur selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
----	--	--

Data Penunjang

7.	Data Dasar	Data fisik : a. Approval Specification Dokumen Elevator Mitsubishi Nexiez-MR – Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (PT. Mitsubishi Jaya Elevator); b. Shop Drawing Elevator Mitsubishi Nexiez-MR – Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (PT. Mitsubishi Jaya Elevator); c. Dokumen Spesifikasi Teknis Perencanaan Modernisasi Penggantian Lift Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; d. Dokumen Gambar Pekerjaan Kontruksi Sipil Pendukung Modernisasi Penggantian Lift Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
8.	Standar Teknis	Kriteria Umum Pekerjaan penggantian Lift harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan instalasi elevator dan eskalator yang berlaku, baik segi arsitektural, konstruksi, mekanikal/elektrikal. Standar dan peraturan yang digunakan adalah peraturan terakhir yang masih berlaku yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan transportasi dalam gedung antara lain: a. Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator; b. Standar Nasional Indonesia, Pedoman Teknik, dan rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang elevator
9.	Studi –Studi Terdahulu	Tidak ada
10.	Referensi Hukum	a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PeraturanPeraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
11.	Lingkup Pekerjaan	Lingkup kegiatan meliputi : a. Penyedia jasa konsultansi pengawasan adalah tenaga ahli konsultan perorangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas-tugas konsultansi dalam bidang pengawasan pekerjaan modernisasi penggantian lift Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; b. Konstruksi adalah pekerjaan konstruksi modernisasi penggantian lift dan konstruksi sipil pendukung; c. Penyedia jasa pengawasan berfungsi melaksanakan pengawasan pada tahap pelaksanaan konstruksi penggantian lift dan konstruksi sipil pendukung; d. Penyedia jasa pengawasan mulai bertugas sejak ditetapkannya SPMK sampai dengan paling lambat 2 (dua)

Handwritten signature

		<p>minggu setelah serah terima pekerjaan oleh penyedia jasa pelaksanaan kontruksi;</p> <p>e. Penyedia jasa pengawas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen;</p> <p>f. Kegiatan pengawasan teknis meliputi :</p> <p>f.1. pengendalian waktu;</p> <p>f.2. pengendalian biaya;</p> <p>f.3. pengendalian pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas; dan</p> <p>f.4 tertib administrasi Pekerjaan Modernisasi Penggantian Lift.</p> <p>g. Pengawasan teknis yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan, meliputi:</p> <p>g.1. pengawasan persiapan kontruksi;</p> <p>g.2. pengawasan tahap pelaksanaan kontruksi sampai dengan serah terima.</p> <p>h. Penyedia jasa pengawas memiliki tanggung jawab memberikan rekomendasi kelaikan fungsi lift yang diawasi kepada Pejabat Pembuat Komitme.</p>
12.	Kegiatan dan Tugas	<p>Kegiatan pengawasan terdiri dari :</p> <p>a. Melakukan identifikasi bahaya dan penetapan resiko terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan modernisasi penggantian lift;</p> <p>b. Memeriksa, mempelajari serta memastikan dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan dilapangan telah lengkap, detail dan benar;</p> <p>c. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan modernisasi penggantian lift;</p> <p>d. Mengawasi pelaksanaan dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume selama pelaksanaan konstruksi;</p> <p>e. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift;</p> <p>f. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan harian, laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan modernisasi penggantian lift yang dibuat oleh penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift;</p> <p>g. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (<i>shop drawing</i>) yang diajukan oleh penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift;</p> <p>h. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (<i>as built drawing</i>) sebelum serah terima;</p> <p>i. Menyusun daftar barang diterima, daftar barang cacat, atau rusak sebelum barang datang diterima;</p> <p>j. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kondisi barang komponen lift datang;</p> <p>k. Menyusun daftar cacat atau kerusakan sebelum serah terima pekerjaan;</p> <p>m. Menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan;</p> <p>n. Menyusun berita acara bukti kedatangan barang lengkap dengan pendukungnya (<i>bill of loading</i>), berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeliharaan/garansi, dan berita acara serah terima</p>

dt

		<p>barang/pekerjaan sebagai kelengkapan pembayaran termin pekerjaan pekerjaan modernisasi penggantian lift;</p> <p>o. Melakukan pemeriksaan dan menyatakan modernisasi penggantian lift Gedung sesuai dengan Approval Specification Dokumen dan dapat berfungsi dengan baik sesuai rencana;</p> <p>p. Membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi.</p>															
13.	Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<p>a. Peralatan Tidak ada;</p> <p>b. Material Tidak ada;</p> <p>c. Personel Terdapat penugasan Staf yang akan melakukan pendampingan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi;</p> <p>d. Fasilitas Tidak ada.</p>															
14.	Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	<p>a. Kendaraan untuk operasional;</p> <p>b. Peralatan untuk survey lapangan dan pengukuran;</p> <p>c. Peralatan untuk keperluan kantor.</p>															
15.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Melakukan Pengawasan Pekerjaan Modernisasi Penggantian Lift Gedung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan KAK.															
16.	Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 153 hari kalender sejak pembongkaran komponen lift dimulai sampai dengan pekerjaan kontruksi sipil pendukung selesai.															
17.	Kebutuhan Personil	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Posisi</th> <th colspan="3">Kualifikasi</th> <th rowspan="2">Jumlah (orang)</th> </tr> <tr> <th>Pendidikan</th> <th>Keahlian</th> <th>Pengalaman</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tenaga Ahli Lift</td> <td>S1</td> <td>SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator</td> <td>2 tahun dibidang lift</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Posisi	Kualifikasi			Jumlah (orang)	Pendidikan	Keahlian	Pengalaman	1.	Tenaga Ahli Lift	S1	SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	2 tahun dibidang lift	1
No.	Posisi	Kualifikasi			Jumlah (orang)												
		Pendidikan	Keahlian	Pengalaman													
1.	Tenaga Ahli Lift	S1	SKA Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	2 tahun dibidang lift	1												
18.	Jadwal Pelaksanaan	Jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak SPMK.															

Laporan

19.	Laporan Pengawasan Bersama Konsultan Perencana	<p>Pelaksanaan kontruksi harus mendapatkan pengawasan teknis oleh penyedia jasa konsultan pengawasan, dan pengawasan berkala oleh penyedia jasa perencana, meliputi :</p> <p>a. Semua berkas perijinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift;</p> <p>b. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);</p> <p>c. Kontrak kerja pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift fisik, pekerjaan pengawasan beserta segala perubahan atau adendumnya;</p> <p>d. Berita acara pelaksanaan kontruksi yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, kedatangan barang lengkap dengan pendukungnya (<i>bill of loading</i>), dan serah terima barang/pekerjaan modernisasi penggantian lift dilampiri dengan berita acara pemeriksaan dan pelaksanaan pemeliharaan lift.</p>
20.	Laporan Pengawasan	Laporan pengawasan pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift, meliputi :

14

Pelaksanaan Kontruksi	<p>a. Laporan pengawasan pekerjaan modernisasi penggantian lift terdiri atas laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan akhir pengawasan teknis termasuk laporan uji mutu dan laporan akhir pekerjaan perencanaan;</p> <p>b. Berita acara pengawasan yang terdiri atas perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah atau kurang, kedatangan barang lengkap dengan pendukungnya (<i>bill of loading</i>), serah terima barang/pekerjaan dilampiri berita acara pelaksanaan pemeliharaan lift, pemeriksaan pekerjaan dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift;</p> <p>c. Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi (<i>commissioning test</i>) disusun bersama penyedia jasa pengawasan kontruksi;</p> <p>d. Memastikan garansi atau surat jaminan mutu;</p> <p>e. Surat pernyataan kelaikan fungsi;</p> <p>f. Manual operasi dan Pemeliharaan lift;</p> <p>g. Dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan modernisasi penggantian lift.</p>
-----------------------	---

Hal-Hal Lain

21.	Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia
22.	Persyaratan Kerja Sama	Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : Kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain atas persetujuan dari PPKom.
23.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan sesuai persyaratan dan kaidah teknis maupun regulasi yang berlaku tentang elevator
24.	Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, penyedia jasa konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada pemberi tugas.

Handwritten signature

Semarang, 13 Juni 2023

INSPEKTUR PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731015 199703 1 002

